

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG  
DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN PONOROGO**

**ANALISIS PENGGUNA METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG  
(MKJP) DENGAN PENGGUNA METODE KONTRASEPSI JANGKA PENDEK  
(NON MKJP) PADA KEPESERTAAN KB BARU DI KABUPATEN PONOROGO**



**Oleh:**

**ALIFIAH PUJI LARASATI**

**NIM. 101711133112**

**DEPARTEMEN EPIDEMIOLOGI, BIostatistika KEPENDUDUKAN DAN  
PROMOSI KESEHATAN  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK**  
**DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PONOROGO**

Disusun oleh:

**ALIFIAH PUJI LARASATI**

**NIM. 101711133112**

Telah disahkan dan diterima baik oleh:

Pembimbing Departemen,

Surabaya, 4 Maret 2021



Nurul Fitriyah. S. KM., M.PH

NIP. 197511212005012002

Pembimbing di DPPKB Ponorogo,

Ponorogo, 4 Maret 2021



Drs. Bambang Suharyanto

NIP. 19640311 199203 1 009

Mengetahui, Ketua Departemen Epidemiologi,  
Biostatistika Kependudukan dan Promosi Kesehatan

Surabaya, 4 Maret 2021



Dr. Fariani Syahrul, SKM., M.Kes.

NIP. 196902101994032002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya Laporan Pelaksanaan Magang di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dengan baik. Pada laporan ini dijabarkan perbandingan minat peserta KB baru yang memilih Metode Kontrasepsi Jangka Panjang dan Jangka Pendek di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Pada kesempatan ini, saya sebagai penulis menyampaikan rasa terima kasih banyak kepada semua pihak yang membantu proses magang dan penyusunan laporan dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Santi Martini, dr., M.Kes. selaku Dekan Fakultas kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga;
2. Dr. Muji Sulistyowati, S.KM., M.Kes. selaku koordinator Program Studi Fakultas Kesehatan Masyarakat;
3. Dr. Fariani Syahrul, S.KM., M.Kes. selaku Ketua Departemen Epidemiologi, Biostatistika Kependudukan;
4. Nurul Fitriyah, S.K.M., M.P.H selaku dosen pembimbing magang;
5. Drs. Harjono, M.Kes selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo;
6. Drs. Bambang Suharyanto selaku dosen pembimbing magang di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo;
7. Para staf dan karyawan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo; serta
8. Teman-teman sekelompok magang saya Ruri Kharisma dan Nuranisah Djunaedi.

Pada penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan dari segi penyusunan serta cara penulisan laporan ini. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat dibutuhkan untuk perbaikan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain yang memanfaatkannya.

Lumajang, 8 Maret 2020

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan .....	2
1.2.1 Tujuan Umum.....	2
1.2.2 Tujuan Khusus.....	2
1.3 Manfaat .....	2
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>4</b>
2.1 Program Keluarga Berencana (KB).....	4
2.1.1 Pengertian Keluarga Berencana .....	4
2.1.2 Tujuan Program Keluarga Berencana.....	4
2.1.3 Manfaat Program Keluarga Berencana.....	5
2.1.4 Peserta KB .....	5
2.2 Metode Kontrasepsi .....	5
2.2.1 Metode Kontrasepsi Jangka Panjang.....	6
2.2.2 Metode Kontrasepsi Jangka Pendek.....	10
<b>BAB III METODE KEGIATAN MAGANG .....</b>	<b>13</b>
3.1 Lokasi Pelaksanaan Magang.....	13
3.2 Waktu Pelaksanaan Magang .....	13
3.3 Metode Pelaksanaan Magang.....	14
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	15
3.5 Output Kegiatan .....	15
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>16</b>

4.1 Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo .....	16
4.1.1 Kondisi Geografis.....	16
4.1.2 Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan.....	16
4.1.3 Struktur Organisasi .....	18
4.2 Gambaran Umum Bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	21
4.2.1 Bidang Keluarga Berencana .....	21
4.2.2 Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera .....	22
4.2.3 Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan.....	23
4.3 Gambaran Pencapaian Peserta KB Baru di Kabupaten Ponorog .....	24
4.4 Gambaran Minat Peserta KB Baru terhadap Metode Kontrasepsi .....	26
4.4.1 Peserta KB Baru yang Menggunakan MKJP .....	26
4.4.2 Peserta KB Baru yang Menggunakan Non MKJP.....	29
4.4.3 Persentase Peserta KB Baru yang Menggunakan MKJP dan Non MKJP.....	32
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	34
5.1 Kesimpulan .....	34
5.2 Saran.....	34
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	35
<b>LAMPIRAN</b> .....	37

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b>	Timeline Kegiatan Magang di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo .....	13
------------------	---	----

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 4.1</b>	Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo .....	18
<b>Gambar 4.2</b>	Capaian Peserta KB Baru Kabupaten Ponorogo.....	24
<b>Gambar 4.3</b>	Peta Sebaran Persentase Peserta KB Baru di Kabupaten Ponorogo.....	25
<b>Gambar 4.4</b>	Persentase MKJP yang Diminati oleh Peserta KB Baru .....	27
<b>Gambar 4.5</b>	Sebaran Persentase Minat MKJP pada Peserta KB Baru Per Kecamatan di Kabupaten Ponorogo	28
<b>Gambar 4.6</b>	Persentase Non MKJP yang Diminati oleh Peserta KB Baru .....	29
<b>Gambar 4.7</b>	Sebaran Persentase Minat Non MKJP pada Peserta KB Baru per Kecamatan di Kabupaten Ponorogo.....	30
<b>Gambar 4.8</b>	Perbandingan Persentase MKJP dan Non MKJP seluruh Kabupaten .....	32

## DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN

### Daftar Arti Lambang

,	: Koma
%	: Persen
()	: Tanda Kurung
/	: Atau
<	: Kurang dari
>	: Lebih dari

### Daftar Singkatan

AIDS	: <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
ASI	: Air Susu Ibu
BKB	: Bina Keluarga Balita
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
BKR	: Bina Keluarga Remaja
BKL	: Bina Keluarga Lansia
COVID-19	: <i>Corona Virus Disease 2019</i>
DPPKB	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
FKTP	: Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
FKRTL	: Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
HIV/AIDS	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
IMS	: Infeksi Menular Seksual
IUD	: <i>Intra Uterine Device</i>
KB	: Keluarga Berencana
KKBPK	: Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga
MKJP	: Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
MOP	: Metode Operasi Pria
MOW	: Metode Operasi Wanita
NAPZA	: Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya

Non MKJP	: Metode Kontrasepsi Jangka Pendek
PIK-R/M	: Pusat Informasi dan Konseling Remaja
PKB	: Pengelolaan tenaga penyuluh KB
PLKB	: Petugas Lapangan KB
PUS	: Pasangan Usia Subur
SDKI	: Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
SKAP	: Survei Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu upaya pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah dengan membentuk Keluarga Berencana (KB). Sayangnya selama pandemi COVID-19, pengguna alat kontrasepsi menurun karena masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses di pelayanan kesehatan (Kompas, 2020). Tentu hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kenaikan angka kehamilan saat pandemi. Pemerintah telah menghimbau masyarakat untuk tidak memiliki anak saat pandemi karena dapat beresiko terhadap kesehatan ibu dan janin apabila imunitas ibu menurun (Liputan6, 2020).

Menurut SDKI 2017, sebanyak 29% wanita menggunakan suntik KB, 12% menggunakan pil, 5% menggunakan susuk, 5% menggunakan IUD, dan sebanyak 4% wanita menggunakan MOW. IUD, MOW, dan susuk KB merupakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) untuk wanita. Menurut Survei Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah (SKAP) untuk program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga) pada tahun 2019 sudah mencapai target yaitu dari 24,6% dari 23,5% (BKKBN, 2019). Namun sisanya lebih besar (sebanyak 75,4%) yang tidak menggunakan MKJP. Padahal, yang metode kontrasepsi yang dianjurkan dalam program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga) adalah MKJP (BPS, 2018) karena tingkat efektifitas dalam menekan laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi (Weni, Yuwono dan Idris, 2019).

Sedangkan keikutsertaan pria untuk memakai alat kontrasepsi lebih rendah dari perempuan. Sekitar 3% pria yang menggunakan kondom, kurang dari 1% yang melakukan MOP, dan 3% memakai kontrasepsi tradisional (senggama terputus) (BPS, 2018).

Terlebih pada peserta KB baru yang lebih memilih non MKJP daripada MKJP. Meski demikian, pengguna MKJP pada pasangan usia subur selama tahun 2012 hingga 2017

meningkat dari 11,90% menjadi 14,40% di Jawa Timur dan berada pada posisi ke-11 pengguna MKJP tertinggi di Indonesia. Salah satu daerah di Jawa Timur, yakni Kabupaten Ponorogo, tidak terlepas dari peserta KB baru. Sehingga, dibutuhkan analisis untuk mengetahui penggunaan MKJP dan non MKJP pada peserta KB baru di Kabupaten Ponorogo.

## **1.2 Tujuan**

Adapun tujuan dari laporan ini antara lain

### **1.2.1 Tujuan Umum**

Menganalisis capaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (Non-MKJP) pada kepesertaan KB baru masyarakat Kabupaten Ponorogo

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

1. Mempelajari gambaran umum DPPKB Ponorogo;
2. Menganalisis ketercapaian KB baru di Kabupaten Ponorogo;
3. Menganalisis minat masyarakat peserta KB baru Kabupaten Ponorogo terhadap Non MKJP; dan
4. Menganalisis minat masyarakat Kabupaten Ponorogo terhadap MKJP

## **1.3 Manfaat**

### **1.3.1 Bagi Instansi DPPKB Ponorogo**

1. Mendapatkan bahan evaluasi untuk memenuhi capaian kepesertaan KB baru di Kabupaten Ponorogo
2. Mendapatkan rekomendasi agar Pasangan Usia Subur (PUS) dapat menjadi peserta KB baru

### **1.3.2 Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat**

1. Menambah pustaka mengenai gambaran umum penerapan pengendalian penduduk di masa pandemi COVID-19
2. Menjadi sarana pengenalan Universitas Airlangga kepada instansi DPPKB Ponorogo yang membutuhkan lulusan atau tenaga kerja dari Universitas Airlangga

### 1.3.3 Bagi Mahasiswa

1. Mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh selama kuliah, khususnya di bidang Kesehatan Reproduksi dan Kesehatan Ibu Anak
2. Menambah wawasan tentang pengendalian penduduk melalui program

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Program Keluarga Berencana (KB)**

##### **2.1.1 Pengertian Keluarga Berencana**

Menurut UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Menurut Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional nomor 24 tahun 2017 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran, keluarga berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan, mengontrol waktu saat kehamilan dalam hubungan dengan suami istri dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. WHO mendefinisikan keluarga berencana sebagai kemampuan pasangan untuk mendapatkan jumlah anak yang diinginkan dan juga menentukan jarak kelahiran.

##### **2.1.2 Tujuan Program Keluarga Berencana**

Menurut UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana, tujuan program keluarga berencana antara lain:

1. Mengatur kehamilan yang diinginkan;
  2. Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak;
  3. Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
  4. Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana;
- dan

5. Mempromosikan penyusunan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.

### **2.1.3 Manfaat Program Keluarga Berencana**

Terdapat berbagai manfaat yang didapat apabila seseorang melakukan program KB. Adapaun, manfaatnya antara lain:

1. Menjaga kesehatan ibu dan bayi
2. Mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak
3. Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan
4. Mencegah penyakit menular seksual
5. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
6. Membentuk keluarga yang berkualitas

### **2.1.4 Peserta KB**

Menurut Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional nomor 24 tahun 2017 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran, peserta KB dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Peserta KB aktif adalah akseptor KB yang sedang memakai kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan, dan masih terlindungi oleh efek kontrasepsinya
2. Kepesertaan KB baru adalah kepesertaan yang baru pertama kali menggunakan metode kontrasepsi termasuk yang pasca persalinan pasca keguguran.

## **2.2 Metode Kontrasepsi**

Metode kontrasepsi pada program KB dibagi menjadi dua menurut jangka waktu pemakaiannya, yaitu metode kontrasepsi jangka panjang dan jangka pendek. Berikut adalah penejelasanya berdasarkan Permenkes Nomor 97 Tahun 2014.

## 2.2.1 Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

### 1. IUD

#### a. Pengertian

IUD (*Intra uterine Device*) adalah suatu alat yang terbuat dari bahan plastik lentur yang dililit oleh tembaga atau campuran antara tembaga dan perak. IUD ini nantinya dimasukkan ke dalam rongga rahim dan harus diganti jika sudah digunakan selama beberapa periode. IUD ini juga dikenal sebagai spiral. Lama penggunaan IUD ini antara dua hingga 10 tahun.

#### b. Macam-macam IUD

1. *Copper-T* merupakan jenis IUD dengan bentuk T yang terbuat dari polietilen dan bagian vertikalnya diberi kawat tembaga halus yang berfungsi untuk memberikan efek anti fertilitas dan melepaskan *levonorgestrel* (semacam obat untuk mencegah kehamilan dan termasuk dalam kontrasepsi hormonal) dengan konsentrasi rendah dengan rentang waktu minimal selama 5 tahun.
2. *Copper-7* merupakan jenis IUD yang berbentuk angka 7 yang memiliki diameter batang 32mm yang dililit kawat tembaga. Bentuk angka 7 tersebut berfungsi untuk memudahkan dalam pemasangan kontrasepsi
3. *Multi Load* adalah IUD yang terbuat dari polietilen dengan dua sayap kanan dan kiri yang fleksibel. IUD *Multi Load* memiliki panjang 3,6 cm dengan lilitan kawat seluas 375 mm<sup>2</sup>.
4. *Lippes Loop*, yaitu IUD yang berbentuk huruf S bersambung atau spiral dan terbuat dari bahan polietilen. Berdasarkan ukuran panjang bagian atasnya, *lippes loop* ini memiliki berbagai varian ukuran: tipe A dengan benang warna biru berukuran 25 mm; tipe B dengan benang warna hitam berukuran 27,5 mm; tipe C dengan benang warna kuning berukuran 30 mm; dan tipe D dengan benang putih tebal berukuran 300 mm.

## c. Cara kerja

Adapun cara kerja dari IUD ini adalah:

1. Menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke dalam tuba falopi
2. Mempengaruhi fertilitas sebelum mencapai kavum uteri
3. Mencegah sperma dan ovum bertemu

## d. Kelebihan dan Kekurangan

Metode kontrasepsi IUD ini memiliki ekeftifitas tinggi untuk mencegah terjadinya kehamilan, yakni antara 0,6 hingga 0,8 kehamilan per 100 perempuan. Selain itu, tingkat kegagalannya juga minim, antara 125 hingga 170 kehamilan. Pada IUD tipe *lppes loop*, tidak terjadi perforasi karena terbuat dari bahan plastik. Jika wanita tersebut menggunakan IUD, mereka tidak perlu kunjungan ulang dan juga tidak mempengaruhi hubungan seksual. Bagi wanita pascakelahiran yang menggunakan IUD tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI dan juga dapat dipasang sesegera mungkin setelah abortus jika tidak terjadi infeksi.

Namun metode ini memiliki kekurangan, yaitu bagi wanita yang memakainya akan mengalami pendarahan, seperti *spotting* (keluarnya bercak darah saat tidak menstruasi), perubahan siklus menstruasi (siklus lebih pendek), *amenorrhea* (tidak ada tanda-tanda haid selama 3 bulan atau lebih), *dismenorrhea* (munculnya rasa sakit menstruasi), *menorrhagia* (pendarahan berlebihan selama menstruasi), *fluor albus* (rekurensi vaginosis bakterial: keadaan abnormal pada ekosistem vagina karena bertambahnya flora vagina bakteri anaerob), dan pendarahan post seksual karena posisi benang IUD menggesek perut rahim atau dinding vagina.

### 3. Implan

#### a. Pengertian

Kontrasepsi implan adalah jenis alat kontrasepsi berupa susuk yang terbuat dari karet silastik yang berisi hormon dan dipasangkan di bawah kulit lengan atas. Implan juga dikenal sebagai alat kontrasepsi bawah kulit (AKBK).

#### b. Cara kerja

1. Lendir serviks mengental;
2. Mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga implantasi sulit;
3. Mengurangi transportasi sperma; dan
4. Menekan ovulasi

#### c. Kelebihan dan Kekurangan

Apabila menggunakan metode implan, akseptor akan mengalami perlindungan jangka panjang hingga 5 tahun, cepat subur kembali setelah pencabutan, tidak memerlukan pemeriksaan dalam, dan tidak mengganggu ASI. Namun, implan ini memiliki keterbatasan juga. Akseptor akan membutuhkan pembedahan minor untuk insersi dan pencabutan dan tidak dapat menghentikan pemakaian kontrasepsi sendiri sehingga harus pergi ke fasilitas kesehatan.

### 4. MOW (Metode Operasi Wanita)

#### a. Pengertian

MOW atau Metode Operasi Wanita adalah metode yang diperuntukkan bagi wanita yang sudah tidak ingin hamil lagi. MOW ini dapat dilakukan setelah persalinan normal atau setelah operasi sesar. Pada persalinan normal, idealnya dapat dilakukan 48 jam setelah persalinan atau jika tidak bisa maka harus ditunda hingga 4-6 minggu.

b. Cara kerja

MOW ini akan mengoklusi (mengikat, memotong, atau memasang cincin) pada tuba falopi sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum.

c. Kelebihan dan Kekurangan

Kontrasepsi MOW ini memiliki efektivitas tinggi untuk menghentikan kelahiran, tidak mempengaruhi proses menyusui, dan tidak bergantung pada faktor senggama. Namun, calon akseptor harus mempertimbangkan jika ingin menggunakan metode ini karena bersifat permanen. Selain itu, akseptor akan mengalami rasa tidak nyaman dalam jangka pendek setelah tindakan sehingga harus mengunjungi dokter terlatih.

5. MOP

a. Pengertian

MOP (Metode Kontrasepsi Pria) adalah sebuah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria. MOP ini dapat dilakukan kapan saja, tidak terbatas waktu.

b. Cara kerja

MOP ini akan mengoklusi (mengikat, memotong, atau memasang cincin) vasa deferensia sehingga jalan transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi tidak terjadi.

c. Kelebihan dan Kekurangan

MOP ini memiliki efektivitas yang tinggi pada ketidak-terjadinya proses pembuahan dan sangat aman. Sangat jarang terjadi mortalitas dan morbiditas akibat dari penggunaan MOP. Namun, dampak yang ditimbulkan dapat berupa komplikasi minor seperti infeksi, perdarahan, dan timbulnya rasa nyeri pascaoperasi.

## 2.2.2 Metode Kontrasepsi Jangka Pendek

### 1. Pil KB

#### a. Macam-macam Pil KB

1. Monofasik: terdapat 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen/progestin dalam dosis yang sama dan 7 tablet tanpa hormon
2. Bifasik: terdapat 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen/progestin dalam dua dosis yang berbeda dan 7 tablet tanpa hormon
3. Trifasik: terdapat 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen/progestin dalam tiga dosis yang berbeda dan 7 tablet tanpa hormon

Pil KB ini digunakan setiap saat selama menstruasi, setelah 6 bulan pemberian ASI eksklusif, 3 bulan setelah tidak menyusui, dan 7 hari pascakeguguran.

#### b. Cara kerja

Pil KB ini dapat menekan ovulasi, mencegah implantasi, mengentalkan lendir pada serviks, dan mengganggu pergerakan tuba falopi sehingga transportasi sel telur juga akan terganggu.

#### c. Kelebihan dan kekurangan

Pil KB ini merupakan salah satu metode kontrasepsi jangka pendek sehingga dapat diberhentikan sewaktu-waktu, siklus menstruasi menjadi lebih teratur, dan darah menstruasi berkurang sehingga dapat mencegah anemia. Namun, pil KB ini lebih mahal dibandingkan dengan non MKJP lainnya. Selain itu harus diminim setiap hari dan dapat mempengaruhi volume ASI.

### 2. Suntik KB

a. Macam-macam Suntik KB

1. 25 mg *depo medroksiprogesteron asetat* dan *estradiol sipionat* disuntikkan IM dalam dengan jangka waktu sebulan sekali
2. 50 mg *noretindron anantat* dan 5 mg *estradiol* disuntukkan IM dalam pada calon akseptor dalam jangka waktu sebulan sekali

Suntik KB ini diberikan pertama kali kepada akseptor dalam waktu 7 hari siklus menstruasi; pada wanita yang tidak haid; wanita pascapersalinan 6 bulan, menyusui, dan belum haid; pascapersalinan lebih dari 6 bulan, menyusui, dan sudah haid; pasca persalinan 3 minggu dan tidak menyusui; dan pada wanita pascakeguguran. Perlu dicatat, pemberian suntikan KB ini tidak diberikan saat wanita tidak hamil.

b. Cara kerja

Suntik KB ini dapat menekan ovulasi, membuat lendir pada serviks rahim mengental, menyebabkan atrofi endometrium, dan menghambat transportasi sel gamet oleh tuba falopi

c. Kelebihan dan kekurangan

Keuntungan dari menggunakan suntik KB adalah tidak perlu memeriksakan organ dalam dan tidak perlu menyimpan obat suntik. Namun, kerugian menggunakan suntik KB ini harus kembali 30 hari setelah disuntikkan ke tenga kesehatan. Dan jika ingin berhenti akan lebih sulit karena pemulihan kesuburannya dapat terlambat.

3. Kondom

a. Pengertian

Kondom merupakan sarung karet yang terbuat dari bahan lateks, plastik, atau bahan alami yang dapat dipasang pada penis saat berhubungan seksual. Kondom dapat digunakan pada pria dan wanita yang memiliki bentuk berbeda karena cara menggunakannya pun berbeda.

b. Cara kerja

Pemakaian kondom ini dapat menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel telur dengan cara membungkus sperma di ujung selubung karet yang dipasang sehingga spermanya tidak masuk ke dalam sauran reproduksi wanita. Kondom yang terbuat dari bahan lateks dan vinil dapat mencegah penularan penyakit menular seksual.

c. Kelebihan dan kekurangan

Kelebihan dari pemilihan kondom adalah murah dan dapat ditemukan di supermarket terdekat, tidak perlu pemeriksaan kesehatan khusus, dan dapat mencegah kehamilan serta mencegah menularan PMS. Namun, apabila cara pemasangannya tidak benar akan menyebabkan kegagalan. Selain itu, dapat mengganggu kualitas hubungan seksual dan sulit mempertahankan ereksi.





2. Studi literatur, yaitu memperoleh informasi tertulis dan data data berkaitan dengan instansi dan program yang dikirim oleh pihak instansi berupa softfile dan dari website resmi instansi untuk mendapatkan data sekunder.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperoleh dalam kegiatan magang yaitu data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer didapatkan melalui kegiatan ceramah diskusi, tanya jawab yang dilakukan secara online dengan pihak instansi. Data primer yang spesifik berkaitan dengan bidang tertentu didapatkan melalui kegiatan wawancara mendalam (indepth interview) dengan kepada bidang.

2. Data sekunder

Data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi dari website resmi instansi dan softfile yang berikan oleh pihak instansi berupa Undang Undang, Laporan tahunan, data kasus dan informasi tertulis lainnya.

### **3.5 Output Kegiatan**

Output atau keluaran dari kegiatan magang yaitu mengetahui dan memahami gambaran umum program dan kegiatan yang dilaksanakan di DINas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo, mengetahui gambaran permasalahan kependudukan di Kabupaten Ponorogo dan dapat menyusun alternative solusi atau rekomendasi perbaikan.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo**

##### **4.1.1 Kondisi Geografis**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo terletak di Gedung Terpadu Lt. 5, Jl. Basuki Rahmat No. 24, Tonatan, Ponorogo. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo memiliki dua kontak resmi yang bisa dihubungkan yaitu telepon (0352) 481874 dan faximile 485006

##### **4.1.2 Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan**

a. Tugas Pokok

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki tugas pokok yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

b. Fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2. Pelaksanaan kebijakan pelayanan umum di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
3. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas.
4. Pelaksanaan pengendalian pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

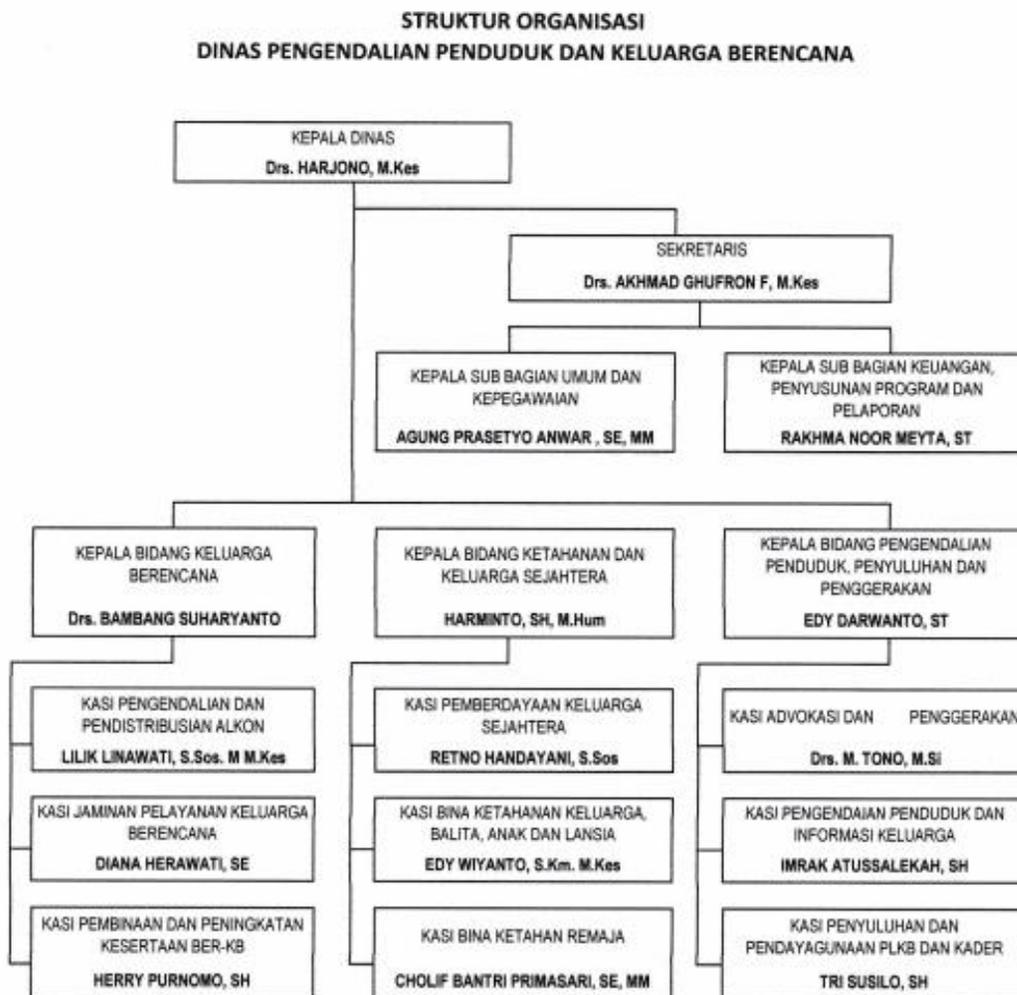
5. Pembinaan teknis semua jenis pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
6. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

c. Kewenangan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki kewenangan:

1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan kabupaten.
3. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai kearifan budaya lokal.
4. Pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) / Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB).
5. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di kabupaten.
6. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesetaraan Keluarga Berencana (KB).
7. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
8. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

### 4.1.3 Struktur Organisasi



**Gambar 4.1** Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta memberikan pembinaan administrasi di bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program Evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Dinas. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi;
- b. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- c. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan keputakaan Dinas;
- d. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;
- e. Penghimpunan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi Dinas;
- g. Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat, terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Keuangan, Penyusunan program dan pelaporan.

### 1) Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan dan umum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana dan pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan Dinas;
- d. Pengelolaan dan perawatan perlengkapan Kantor;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi kekayaan /asset di lingkungan Dinas;
- f. Penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan dinas;

g. Pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas.

2) Sub Bagian Penyusunan program, pelaporan Keuangan

Sub Bagian Penyusunan program, pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi program, pelaporan keuangan di lingkungan Dinas Sub bagian program, pelaporan , keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan badan ;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan, pembukuan, perhitungan dan verifikasi serta perbendaharaan dinas;
- c. pembayaran gaji pegawai di lingkungan dinas;
- d. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan Perencanaan, Pelaporan keuangan Dinas;
- e. Penyiapan bahan dalam rangka koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- f. Pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- g. penyusunan laporan pelaksanaan dan pencapaian kinerja program/kegiatan Dinas;
- h. Penyiapan bahan pelaksanaan waskat;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan penyiapan bahan peningkatan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- j. Pelaksanaann tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas.

3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

## 4.2 Gambaran Umum Bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### 4.2.1 Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana memiliki tugas untuk melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Kabupaten Ponorogo. Bidang ini juga berfungsi sebagai perumusan dan pelaksanaan kebijakan keluarga berencana serta mengevaluasi dan memonitoring Keluarga Berencana (KB). Bidang Keluarga Berencana ini memiliki tiga divisi, yaitu

a. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi

Seksi ini memiliki fungsi sebagai pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan program pengendalian alat kontrasepsi. Di samping itu, seksi ini juga berfungsi dalam pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat kontrasepsi di Kabupaten Ponorogo.

b. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana

Seksi ini berfungsi untuk menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan jaminan pelayanan KB. Seksi ini juga melakukan jaminan pada ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi peserta KB di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pemerintah dan swasta.

c. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-Keluarga Berencana (KB)

Seksi ini berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki kehidupan seksual yang aman dan terbebas dari HIV/AIDS dan IMS. Selain itu, seksi ini juga membantu masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender, terutama pada partisipasi pria dalam pelaksanaan program KB dan kesehatan reproduksi. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber-KB ini juga bertanggung jawab untuk menetapkan sasaran pembinaan peserta KB, perencanaan kehamilan, sasaran penanggulangan kesehatan reproduksi, dan sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak. Selain itu juga memantau tingkat *drop out* peserta KB.

#### 4.2.2 Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera

Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera berfungsi untuk mengembangkan program pemberdayaan ekonomi keluarga, ketahanan keluarga balita; anak; dan lansia, ketahanan keluarga remaja, dan pelebagaan keluarga kecil berkualitas. Selain itu, dalam bidang ini juga berfungsi dalam pelaksanaan identifikasi, analisis, dan penyelesaian masalah di program pemberdayaan ekonomi keluarga, ketahanan keluarga balita; anak; dan lansia, ketahanan keluarga remaja, dan pelebagaan keluarga kecil berkualitas. Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera ini memiliki beberapa seksi di bawahnya, antara lain:

a. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Seksi ini berfungsi untuk menyusun menyebarkan informasi, promosi, dan pembinaan kader yang mengelola program pemberdayaan keluarga sejahtera. Selain itu, seksi ini juga melakukan penyiapan bahan penyusun petunjuk teknis dalam pelaksanaan program, memonitoring, mengevaluasi, dan melaksanakan tugas pemberdayaan keluarga sejahtera.

b. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak, dan Lansia

Seksi ini berfungsi dalam pelaksanaan dan pengendalian program pembentukan karakter anak sejak dini, Bina Keluarga Balita, Anak, dan Lansia. Selain itu, seksi ini juga melakukan bimbingan dan pembinaan kepada kader, pengembangan model, monitoring dan evaluasi program Bina Keluarga Balita, Anak, dan Lansia.

c. Seksi Bina Ketahanan Remaja

Seksi ini berfungsi dalam pembimbingan dan pembinaan program Bina Ketahanan Remaja. Selain itu, seksi ini juga bertugas untuk melaksanakan kegiatan kesehatan reproduksi remaja yang merupakan kegiatan dari program Bina Ketahanan Keluarga, seperti pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual (IMS), dan bahaya Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (NAPZA).

#### **4.2.3 Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan**

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan ini berfungsi untuk memberdayakan dan meningkatkan peran serta organisasi di masyarakat dalam bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Selain itu, bidang ini juga merumuskan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi kebijakan di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi, dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Bidang ini memiliki tiga seksi di bawahnya, yaitu:

a. Seksi Advokasi dan Penggerakan

Seksi ini memiliki fungsi untuk menyusun, mengembangkan, memonitoring, dan mengevaluasi penyuluhan, advokasi, dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Selain itu, juga melakukan hubungan dan kerjasama dengan instansi lainnya dalam hal komunikasi, informasi, edukasi, dan kehumasan program.

b. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB

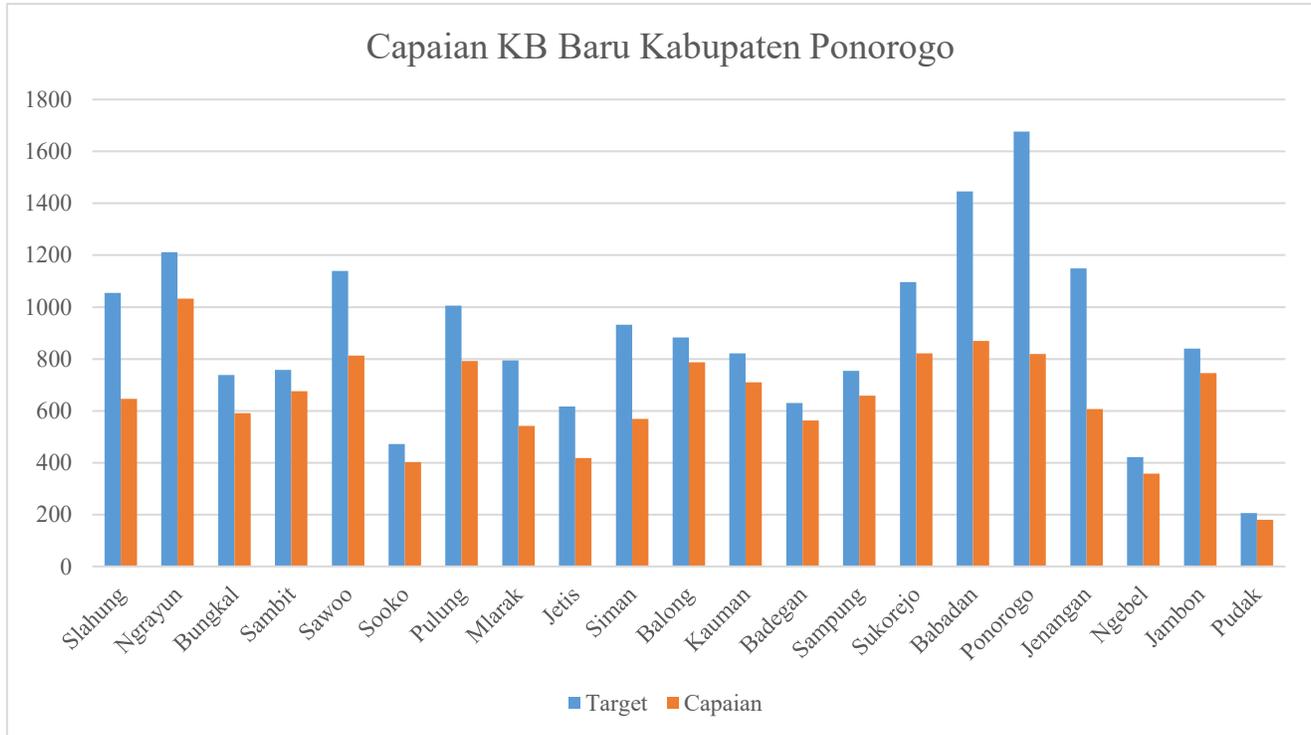
Seksi ini memiliki tugas untuk menyiapkan bahan pembimbingan dan pelaksanaan PKB/PLKB dan institusi masyarakat pedesaan/perkotaan. Selain itu, fungsi dari seksi ini adalah merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, memonitoring, dan mengevaluasi kualitas PKB/PLKB dan kader KB.

c. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

Seksi ini bertugas untuk menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, dan pelaksanaan kebijakan, pengendalian penduduk dan informasi keluarga. Selain itu, seksi ini juga berfungsi sebagai pengelolaan, pengembangan teknologi, pembinaan, pencatatan informasi dan dokumentasi data penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

### 4.3 Gambaran Pencapaian Peserta KB Baru di Kabupaten Ponorogo

Sebagai salah satu penyelenggara program KB di Jawa Timur, Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencananya mempromosikan metode kontrasepsi kepada pasangan usia subur dengan gencar, khususnya bagi yang belum pernah menggunakan metode kontrasepsi. Berikut adalah pencapaian peserta KB baru di Kabupaten Ponorogo yang digambarkan dengan diagram batang berikut :

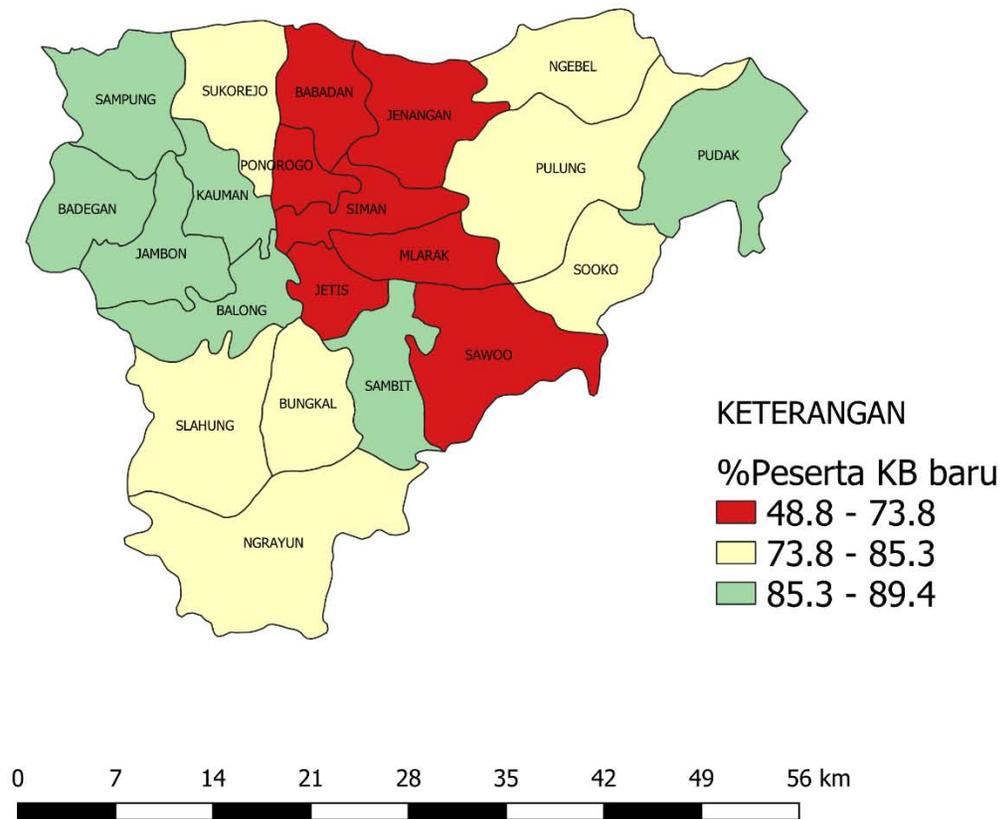


Sumber : Dokumentasi Data Primer Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo, 2020

#### **Gambar 4.2** Capaian Peserta KB Baru Kabupaten Ponorogo

Gambar di atas merupakan gambaran pencapaian peserta KB Baru semua metode di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 yang digambarkan dengan data peserta KB Baru per kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan diagram tersebut, dapat dilihat bahwa tidak ada kecamatan yang memenuhi target peserta KB baru di Kabupaten Ponorogo.

## PERSENTASE SEBARAN PESERTA KB BARU DI KABUPATEN PONOROGO



**Gambar 4.3** Peta Sebaran Persentase Peserta KB Baru di Kabupaten Ponorogo

Menurut peta sebaran tersebut, terdapat 7 kecamatan yang memiliki persentase peserta KB baru terendah dengan persentase peserta KB baru antara 48,8% hingga 73,8%. Jika diurutkan, ketujuh kecamatan terendah yang digambarkan dengan warna merah, antara lain:

1. Kecamatan Ponorogo (48,84%)
2. Kecamatan Jenangan (52,83%)
3. Kecamatan Babadan (60,10%),
4. Kecamatan Siman (61,05%)
5. Kecamatan Jetis (67,75%)
6. Kecamatan Mlarak (68,26%)
7. Kecamatan Sawoo (71,38%)

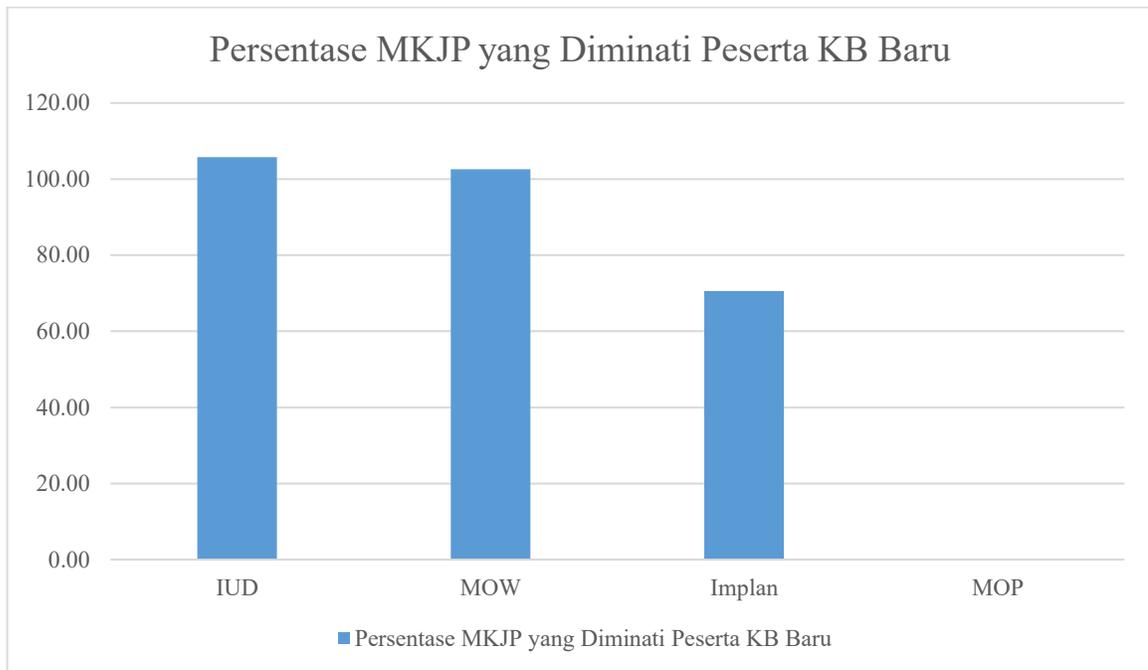
Sedangkan kecamatan dengan persentase peserta KB baru tertinggi (yaitu antara 85,3% hingga 89,4%.) terdapat 7 kecamatan yang digambarkan dengan daerah warna hijau yakni:

1. Kecamatan Badegan (89,37%)
2. Kecamatan Sambit (89,18%)
3. Kecamatan Balong (89,13%)
4. Kecamatan Jambon (88,69%)
5. Kecamatan Sampung (87,40%)
6. Kecamatan Pudak (87,35%)
7. Kecamatan Kauman (85,23%)
8. Kecamatan Kauman (85,37%)

#### **4.4 Gambaran Minat Peserta KB Baru terhadap Metode Kontrasepsi**

##### **4.4.1 Peserta KB Baru yang Menggunakan MKJP**

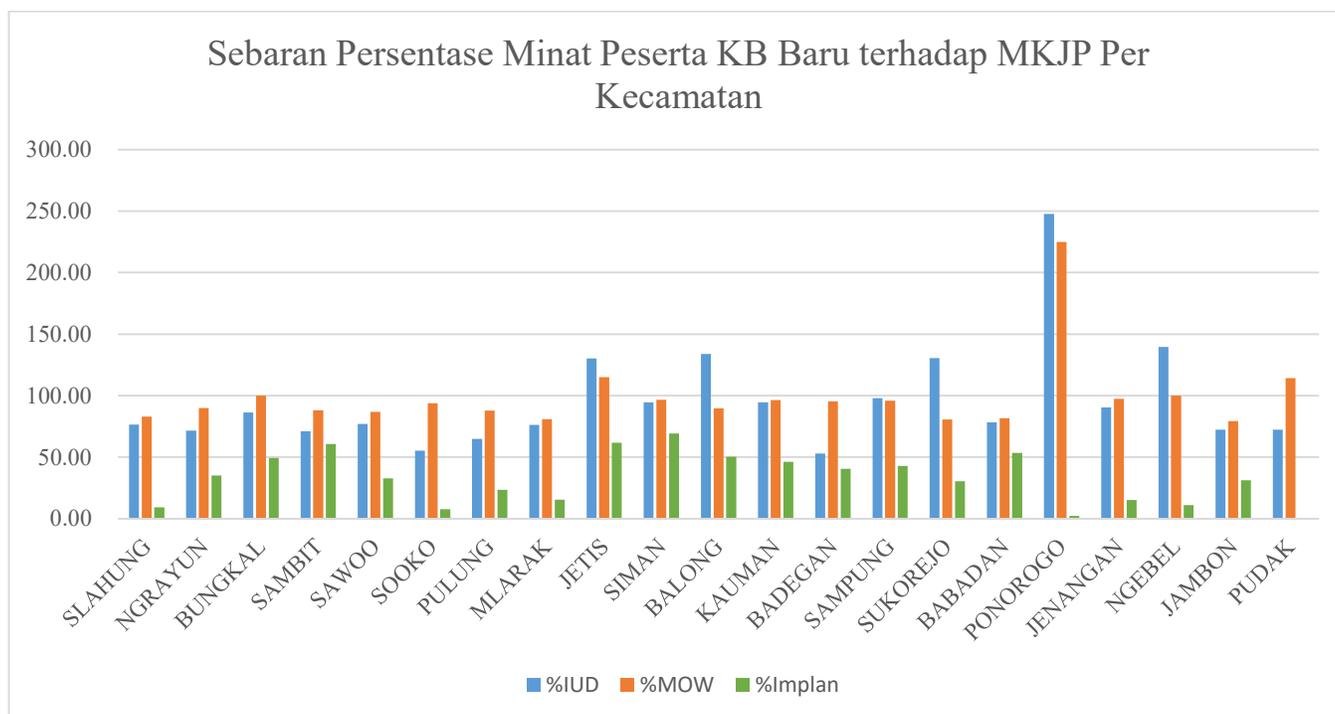
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang digunakan oleh pasangan usia subur di Kabupaten Ponorogo antara lain IUD, MOW, MOP, dan implan. Minat peserta KB baru di Kabupaten Ponorogo digambarkan dengan diagram batang berikut:



**Gambar 4.4** Persentase MKJP yang Diminati oleh Peserta KB Baru

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa jenis MKJP yang paling banyak diminati oleh peserta KB baru di Kabupaten Ponorogo adalah IUD, kemudian disusul oleh MOW dan implan dan hanya IUD dan MOW yang sudah memenuhi target (sudah melebihi 100%), kecuali implan untuk MKJP pada wanita.

Pada grafik tersebut juga terlihat bahwa tidak ada pasangan usia subur yang melakukan MOP. Padahal, calon akseptor MOP ini sudah ada yang mendaftar untuk melakukan MOP. Namun karena adanya pandemi corona, dokter yang menangani memutuskan untuk menunda operasi dan lebih memfokuskan dalam penanganan kasus COVID-19. Meskipun demikian, pelayanan MOW tidak ditunda karena dilakukan setelah persalinan, khususnya setelah persalinan cesar yang dilakukan di rumah sakit.



**Gambar 4.5** Sebaran Persentase Minat MKJP pada Peserta KB Baru Per Kecamatan di Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan grafik sebaran persentase MKJP pada setiap kecamatan di Kabupaten Ponorogo, terdapat lima kecamatan yang memenuhi target MKJP IUD pada peserta KB baru. Kecamatan-kecamatan tersebut antara lain:

1. Kecamatan Ponorogo (247,83%)
2. Kecamatan Ngebel (139,66%)
3. Kecamatan Balong (133,88%);
4. Kecamatan Sukorejo (130,67%); dan
5. Kecamatan Jetis (130,23%);

Pada MKJP dengan jenis MOW, ada tiga kecamatan yang sudah mencapai target. Kecamatan tersebut antara lain:

1. Kecamatan Ponorogo (225,00%);
2. Kecamatan Jetis (115,00%);
3. Kecamatan Puduk (114,29%);
4. Kecamatan Ngebel (100,00%); dan

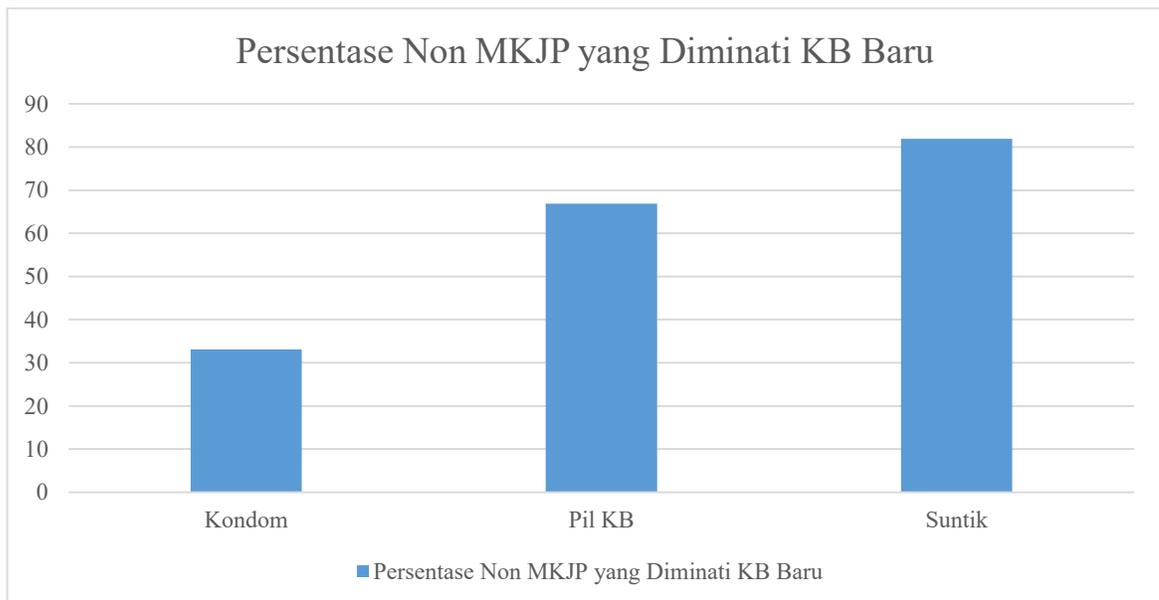
#### 5. Kecamatan Bungkal (100,00%)

Namun peserta KB baru yang memilih MKJP jenis implan lebih sedikit jika dibandingkan dengan IUD dan MOW, bahkan tidak ada yang mencapai target. Terdapat beberapa kecamatan tertinggi pengguna implan yang melampaui setengah dari target, yaitu:

1. Kecamatan Siman (69,23%);
2. Kecamatan Jetis (61,67%);
3. Kecamatan Sambit (60,81%);
4. Kecamatan Babadan (53,38%); dan
5. Kecamatan Balong (50,29%)

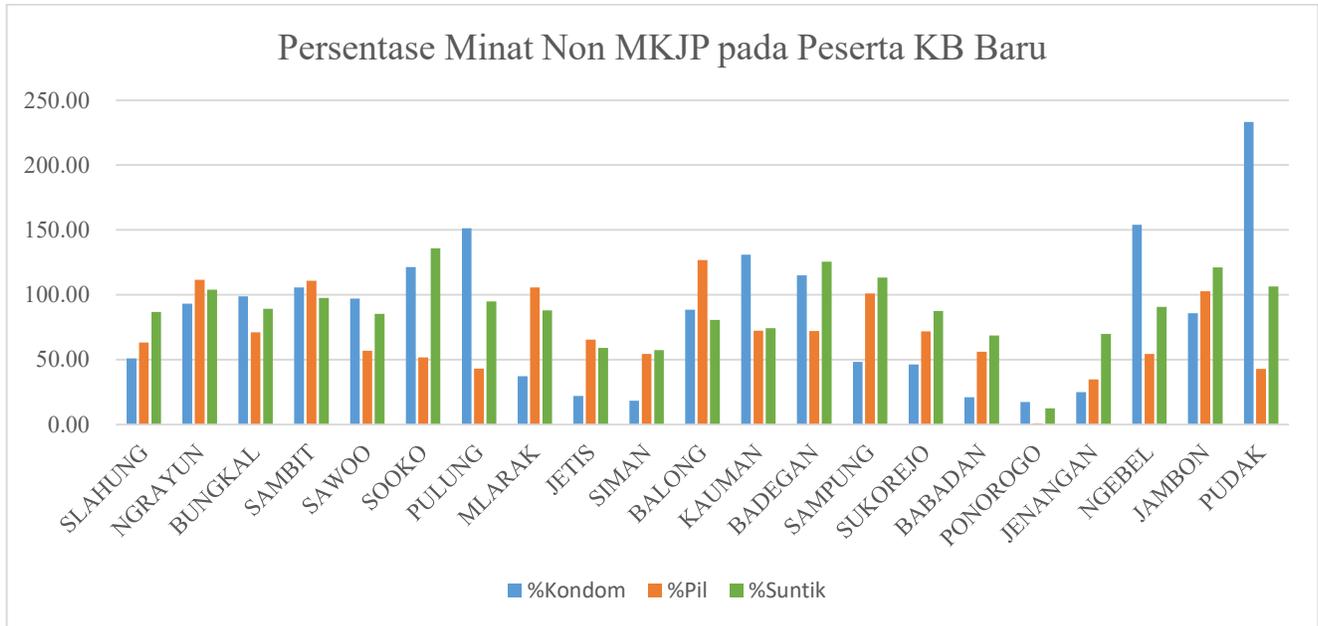
#### 4.4.2 Peserta KB Baru yang Menggunakan Non MKJP

Metode Kontrasepsi Jangka Pendek (non MKJP) yang digunakan pasangan usia subur Kabupaten Ponorogo antara lain kondom, pil KB, dan suntik. Berikut adalah minat peserta KB baru di Kabupaten Ponorogo dalam memilih non MKJP yang digambarkan oleh grafik batang berikut:



**Gambar 4.6** Persentase Non MKJP yang Diminati oleh Peserta KB Baru  
Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa suntik KB paling diminati oleh

peserta KB baru wanita daripada metode pil KB. Untuk non MKJP pada pria, yaitu kondom, adalah metode alternatif yang dipilih oleh akseptor karena ada penundaan pelayanan MOP selama pandemi COVID-19. Namun, peserta KB baru yang menggunakan kondom masih sangat sedikit dibandingkan dengan pil KB dan suntik.



**Gambar 4.7** Sebaran Persentase Minat Non MKJP pada Peserta KB Baru per Kecamatan di Kabupaten Ponorogo

Menurut grafik di atas, terdapat 7 daerah yang memenuhi target dari peserta KB baru yang menggunakan kondom, kecamatan-kecamatan tersebut antara lain:

1. Kecamatan Pudak (233,33%);
2. Kecamatan Ngebel (154,00%);
3. Kecamatan Pulung (151,26%);
4. Kecamatan Kauman (130,93%);
5. Kecamatan Sooko (121,43%)
6. Kecamatan Badegan (114,86%); dan
7. Kecamatan Sambit (105,56%)

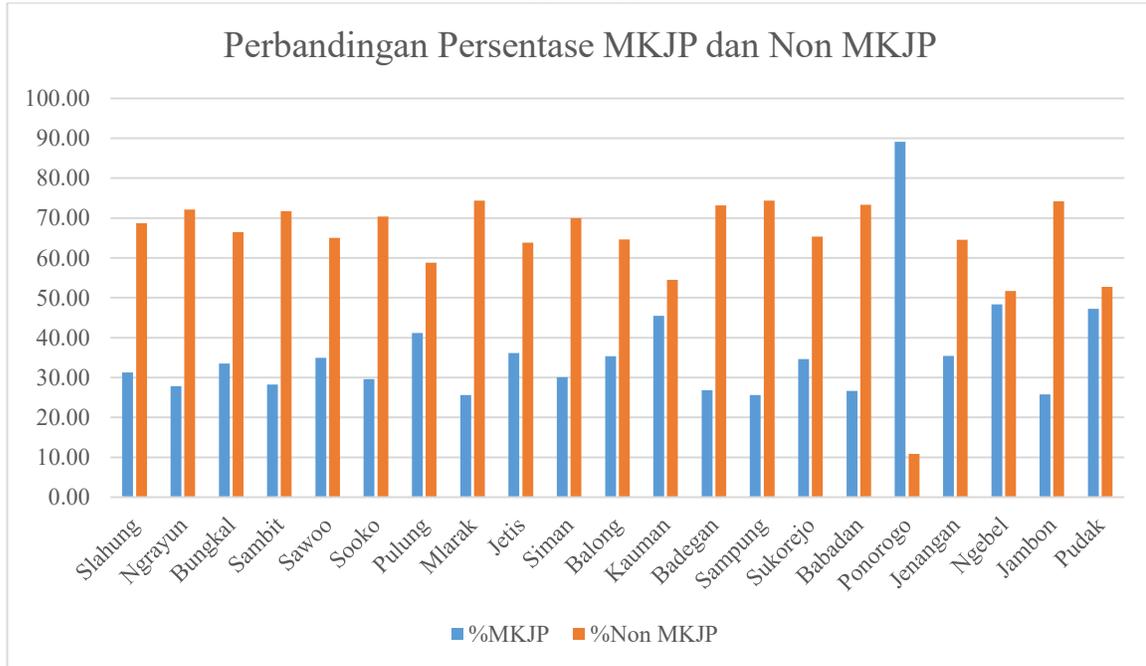
Untuk Non MKJP bagi wanita, yakni Pil KB dan suntik, memiliki sebaran minat yang hampir sama pada peserta KB baru di Kabupaten Ponorogo. Untuk yang menggunakan pil KB, terdapat 5 kecamatan yang berhasil memenuhi target dari pemerintah, antara lain:

1. Kecamatan Balong (126,67%);
2. Kecamatan Ngrayun (111,52%);
3. Kecamatan Sambit (110,68%);
4. Kecamatan Mlarak (105,56%); dan
5. Kecamatan Sampung (100,98%)

Sedangkan bagi kecamatan dengan peserta KB baru yang melakukan suntik KB juga terdapat 5 kecamatan yang telah memenuhi target dari pemerintah, penyebarannya sebagai berikut:

1. Kecamatan Sooko (135,75%);
2. Kecamatan Jambon (121,07%);
3. Kecamatan Sampung (113,29%);
4. Kecamatan Pudak (106,41%); dan
5. Kecamatan Ngrayun (103,91%)

#### 4.4.3 Persentase Peserta KB Baru yang Menggunakan MKJP dan Non MKJP



**Gambar 4.8** Perbandingan Persentase MKJP dan Non MKJP seluruh Kabupaten

Berdasarkan grafik pada gambar 4.6, mayoritas peserta KB baru di Kabupaten Ponorogo lebih memilih menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek (Non MKJP), kecuali Kecamatan Ponorogo yang persentase pilihan MKJP-nya lebih besar daripada non MKJP. Tiga kecamatan tertinggi dengan minat MKJP pada peserta KB baru yaitu terdapat pada:

1. Kecamatan Ponorogo (89,13%)
2. Kecamatan Ngebel (48,32%)
3. Kecamatan Pudak (47,22%)

Sedangkan tiga kecamatan tertinggi dengan minat pada non MKJP pada peserta KB baru adalah

1. Kecamatan Sampung (74,36%)
2. Kecamatan Mlarak (74,35%)
3. Kecamatan Babadan (74,23%)

Di Kabupaten Ponorogo sendiri, penyebab peserta KB baru lebih banyak memilih non MKJP daripada MKJP adalah kurangnya pengetahuan seputar MKJP, takut dengan berbagai efek samping, dan juga takut gagal. Lembaga yang berwenang untuk mendukung penggunaan metode kontrasepsi seperti BKB, BKR, BKL, dan PIK-R/M serta penyuluhan juga belum maksimal. Hal ini dikarenakan selama ini penyuluhan dilakukan dengan mengumpulkan orang banyak dan dilakukan dengan tatap muka, sehingga ketika terjadi pandemi seperti sekarang, kegiatan tersebut terhalang dilaksanakan dan juga tenaga penyuluh yang semakin berkurang. Hal tersebut dapat menghambat ketercapaian peserta KB baru di Kabupaten Ponorogo.

Masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan juga akan lebih memilih menggunakan MKJP daripada non MKJP karena masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan, cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik. seperti halnya pada gambar 4.6 tersebut, Kecamatan Ponorogo yang merupakan pusat dari Kabupaten Ponorogo lebih banyak memilih menggunakan MKJP daripada non MKJP. Namun sayangnya di daerah tersebut memiliki persentase peserta KB baru masih rendah. Padahal, berdasarkan KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) metode yang dianjurkan adalah metode kontrasepsi jangka panjang. Hal ini untuk mengurangi risiko *drop out* dan sebagai upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak guna menanggulangi kemiskinan. Dari segi harga, MKJP lebih murah karena satu kali bayar untuk lima tahun ke depan, sedangkan non MKJP harus rutin dilakukan setiap bulan sehingga untuk pembayarannya pun juga harus dilakukan setiap bulan yang jika diakumulasikan akan lebih mahal daripada MKJP.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis, kesimpulan yang didapat antara lain:

1. Terdapat 7 daerah dengan persentase peserta KB baru dengan tingkatan rendah, sedang, dan tinggi di Kabupaten Ponorogo. Bahkan pusat kecamatan Kabupaten Ponorogo pun termasuk daerah yang memiliki peserta KB baru terendah (masuk dalam warna merah pada peta).
2. Metode kontrasepsi yang paling diminati oleh peserta KB baru adalah non MKJP karena pengetahuan tentang MKJP masih kurang, takut gagal, dan takut dengan berbagai efek samping yang ditimbulkan oleh MKJP. Selain itu, penyuluhan masih belum maksimal karena tenaga penyuluh yang semakin turun dan adanya pandemi sehingga tidak bisa melakukan penyuluhan tatap muka.

#### **5.2 Saran**

1. Menggunakan penyuluhan secara *online* dengan memanfaatkan sosial media untuk mengajak masyarakat Kabupaten Ponorogo untuk menggunakan MKJP;
2. Mengajak komunitas anak muda di Kabupaten Ponorogo untuk membantu sosialisasi tentang KB dan juga MKJP kepada masyarakat; dan
3. Bekerja sama dengan berbagai komunitas masyarakat dan anak muda untuk membantu menyampaikan informasi seputar KB dan MKJP pada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN (2019) *Menyongsong Wajah Baru Program KKBPK Menuju Tahapan Renstra BKKBN 2020 - 2024*, *bkkbn.go.id*. Available at: <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/menyongsong-wajah-baru-program-kkbpk-menuju-tahapan-renstra-bkkbn-2020-2024> (Accessed: 7 March 2021).
- BPS (2018) *Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017*, Badan Pusat Statistik. Jakarta. Available at: <https://archive.org/details/LaporanSDKI2017>.
- Dewi, P. H. C. and Notobroto, H. B. (2014) 'Rendahnya Keikutsertaan Pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Pada Pasangan Usia Subur Di Polindes Tebalo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik', *Biometrika dan Kependudukan*, 3, pp. 66–72. Available at: <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-biometrik6ad6c0a8502full.pdf>.
- Isnaini, D. (2018) 'Perkembangan Program KB Di Kotamadya Yogyakarta Tahun 1970-1998', *Prodi Ilmu Sejarah*, 3(3), p. 394. Available at: <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/ilmu-sejarah/article/viewFile/12426/11973>.
- Kompas (2020) *Penggunaan Kontrasepsi Turun Drastis Selama pandemi*, *lifestyle.kompas.com*. Available at: <https://lifestyle.kompas.com/read/2020/06/12/203738420/penggunaan-kontrasepsi-turun-drastis-selama-pandemi?page=all>. (Accessed: 7 March 2021).
- Kompas (2021) *Dalam 10 Tahun, Jumlah Penduduk Indonesia Bertambah 32,5 Juta Jiwa*, *money.kompas.com*. Available at: <https://money.kompas.com/read/2021/01/22/160830626/dalam-10-tahun-jumlah-penduduk-indonesia-bertambah-325-juta-jiwa?page=all> (Accessed: 7 March 2021).
- Liputan6 (2020) *Penting Pakai Alat Kontrasepsi di Masa Pandemi Corona*, *liputan6.com*. Available at: <https://www.liputan6.com/health/read/4244602/penting-pakai-alat-kontrasepsi-di-masa-pandemi-corona> (Accessed: 7 March 2021).
- Priohutomo, S. (2018) Kebijakan dan strategi program kkbpk dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ibu. Available at: [https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/2018.05.07.Kaltim.Kebijakan\\_dan\\_Strategi\\_Program\\_KKBPK\\_dalam\\_peningkatan\\_kesehatan\\_ibu\\_\(Diskusi\\_I\\_HOGSI\).pdf](https://www.bkkbn.go.id/po-content/uploads/2018.05.07.Kaltim.Kebijakan_dan_Strategi_Program_KKBPK_dalam_peningkatan_kesehatan_ibu_(Diskusi_I_HOGSI).pdf).
- Ramania, N. A. C. (2020) 'Determining Factors Related To the Type of Contraceptives in Indonesia', *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, 9(2), p. 112. doi: 10.20473/jbk.v9i2.2020.112-120.
- Suryanti, Y. (2019) 'Faktor - Faktor yang Berhubungan dengan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Wanita Usia Subur', *Jambura Journal of Health Sciences and Research*, 1(1), pp. 20–29. doi: 10.35971/jjhsr.v1i1.1795.
- Triyanto, L. and Indrani, D. (2019) 'Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Jenis Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Mkjp) Pada Wanita Menikah Usia Subur Di Provinsi Jawa

Timur', *The Indonesian Journal of Public Health*, 13(2), p. 246. doi: 10.20473/ijph.v13i2.2018.246-257.

Weni, L., Yuwono, M. and Idris, H. (2019) 'Determinan Pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang Pada Akseptor Kb Aktif Di Puskesmas Pedamaran', *Scientific Periodical of Public Health and Coastal Health*, 1(1), pp. 9–16. Available at: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/contagion/article/view/4819>.

## LAMPIRAN

### A. Surat Audiensi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**  
Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5920948, 5920949 Fax. 031-5924618  
Website: <http://www.fkm.unair.ac.id>; E-mail: [info@fkm.unair.ac.id](mailto:info@fkm.unair.ac.id)

Nomor : 5 2 4 6 /UN3.1.10/PK/2020 4 Nopember 2020  
Hal : Permohonan Audiensi Online

Yth. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo  
Ponorogo, Gedung Terpadu Lt.5 Jl. Basuki Rahmat No.24, Tonatan, Ponorogo

Sehubungan dengan adanya kegiatan Magang Online bagi Mahasiswa Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, dengan ini kami mohon kesediannya untuk Audiensi terlebih dulu sebelum pelaksanaan magang yang dilaksanakan pada :

Hari/tanggal: Jumat/ 13 Nopember 2020  
Pukul : 10.00 -12.00 WIB  
Acara : Audiensi Magang  
Tempat : Zoom Meeting  
<https://zoom.us/j/99786457304?pwd=bm01Q2tEbkI5RVc1TVl6YnhmY3FEQT09>  
Meeting ID : 997 8645 7304, Password : 659765

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Dr. Nyoman Anita Damayanti, drg., M.S.  
NIP 196202281989112001 *l.*

Tembusan:

1. Dekan FKM UNAIR;
2. KPS S1 Kesmas FKM UNAIR

**B. Surat Permohonan Izin Kegiatan Magang di DPPKB Ponorogo**
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**
**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5920948, 5920949 Fax. 031-5924618

 Website: <http://www.fkm.unair.ac.id>; E-mail: info@fkm.unair.ac.id

 Nomor : 5662/UN3.1.10/PK/2020  
 Hal : **Permohonan izin magang**

20 November 2020

 Yth. Kepala  
 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Ponorogo  
 Gedung Terpadu Lt.5 Jl. Basuki Rahmat No.24, Tonatan, Ponorogo

Sehubungan dengan pelaksanaan program magang bagi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana (S1) Tahun Akademik 2020/2021, dengan ini kami mohon Saudara mengizinkan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, atas nama :

No.	Nama Mahasiswa	NIM.	PEMBIMBING	KETERANGAN
1.	Ruri Kharisma Fitriani	101711133108	Nurul Fitriyah,SKM., MPH	Dilakukan secara online dan offline
2.	Alifiah Puji Larasati	101711133112		
3.	Nuranisah Djunaedi	101711133217		

 Sebagai peserta magang di **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Ponorogo**, mulai 18 Januari -26 Februari 2021.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

 a.n. Dekan  
 Wakil Dekan I,  


 Dr. Nyoman Anita Damayanti, drg., M.S.  
 NIP 196202281989112001 *l.*

Tembusan :

1. Dekan FKM UNAIR
2. Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Sarjana, FKM UNAIR
3. Ketua Departemen Biostatistika & Kependudukan, FKM UNAIR
4. Koordinator Magang Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Sarjana, FKM UNAIR
5. Yang bersangkutan

### C. Surat Izin dari Fakultas Kesehatan Masyarakat ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT**  
Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5920948, 5920949 Fax. 031-5924618  
Website: <http://www.fkm.unair.ac.id>; E-mail: [info@fkm.unair.ac.id](mailto:info@fkm.unair.ac.id)

---

Nomor : 5662/UN3.1.10/PK/2020 20 November 2020  
Hal : **Permohonan izin magang**

Yth. Kepala  
Badan Kesatuan Bangsa & Politik  
Provinsi Jawa Timur

Sehubungan dengan pelaksanaan program magang bagi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana (S1) Tahun Akademik 2020/2021, dengan ini kami mohon Saudara mengizinkan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, atas nama :

No.	Nama Mahasiswa	NIM.	PEMBIMBING	KETERANGAN
1.	Ruri Kharisma Fitriani	101711133108	Nurul Fitriyah, SKM., MPH	Dilakukan secara online dan offline
2.	Alifiah Puji Larasati	101711133112		
3.	Nuranisah Djunaedi	101711133217		

Sebagai peserta magang di **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Ponorogo**, mulai 18 Januari -26 Februari 2021.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I,



Dr. Ayotun Anita Damayanti, drg., M.S.  
NIP 196202281989112001

Tembusan :

1. Dekan FKM UNAIR
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Ponorogo
3. Koordinator Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Sarjana, FKM UNAIR
4. Ketua Departemen Biostatistika & Kependudukan, FKM UNAIR
5. Koordinator Magang Program Studi Kesehatan Masyarakat, Program Sarjana, FKM UNAIR
6. Yang bersangkutan

**D. Surat Perizinan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
JALAN PUTAT INDAH NO. 1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493  
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 4 Januari 2021

Nomor : 070/008/209.4/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada  
Yth. Bupati Ponorogo  
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
di  
PONOROGO

Menunjuk surat : Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya  
Nomor : 5662/UN3.1.10/PK/2020  
Tanggal : 20 November 2020

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : RURI KHARISMA FITRIANI, dkk  
Alamat : Jl. Untung Siropati RT.02/RW.01 Bungkal Ponorogo / 081249828100  
Pekerjaan : Mahasiswa /UNAIR  
Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

Judul : "Magang"  
Tujuan/bidang : Mencari data, Wawancara, Magang/ Kesehatan  
Dosen Pembimbing : NURUL FITRIYAH, S.KM., M.PH.  
Peserta : 1. ALIFIAH PUJI LARASATI  
2. NURANISAH DJUNAEDI  
Waktu : 3 bulan  
Lokasi : Kabupaten Ponorogo

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk menjadi maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Kepala Bidang Budaya Politik

  
JOHAN FITRIADI, S.STP., M.Si  
Pembina Tk. I (I/IV/b)  
NIP. 19781120 199802 1 001

**Tembusan :**  
Yth. 1. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya ;  
2. Yang bersangkutan.

**E. Surat Permohonan Izin dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur ke Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Ponorogo**



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Aloun-aloun Utara Nomor 6 Telepon (0352) 483852  
**PONOROGO**

Kode Pos 63413

**REKOMENDASI**

Nomor : 072 / 06 / 405.28 / 2021

Berdasarkan surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur, Tanggal 04 Januari 2021 Nomor : 070/008/204.4/2021, perihal Permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Peneliti	: <b><u>RURI KHARISMA FITRIANI.</u></b> Mhs. Fakultas Kesehatan Masyarakat Univ. Airlangga Surabaya
Alamat	: Jl. Untung Suropati RT. 02 RW. 01 Ds. Kunti Kec. Bungkal Kabupaten Ponorogo
Thema / Acara Survey / Research / PKL / Pengumpulan data/Magang	: " <b>Magang</b> "
Daerah/ Tempat dilakukan PKN/ Survey/ Pengumpulan Data	: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo
Tujuan Penelitian	: Magang / Pemenuhan Mata Kuliah
Tanggal dan atau Lamanya Penelitian	: 18 Januari – 26 Februari 2021
Bidang Penelitian	: Kesehatan
Status Penelitian	: Baru
Nama Penanggungjawab / Koordinator Penelitian	: <b><u>Dr. Nyoman Anita Damayanti, drg., M.S.</u></b> Wakil Dekan I Fak. Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya
Anggota Peneliti	: 1. Alifiah Puji Larasati 2. Nuranisah Djunaedi
Nama Lembaga	: Universitas Airlangga Surabaya.

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Harus Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid 19 ;
2. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat setempat ;
3. Mentaati ketentuan- ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat ;
4. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan baik dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk ;
5. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan seperti tersebut diatas ;
6. Setelah berakhirnya dilakukan Survey/ Research/ PKL diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey / Research / PKL, sebelum meninggalkan daerah tempat Survey / Research / PKL ;
7. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan Survey / Research / PKL diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada :  
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo.
8. Surat Keterangan ini akan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang Surat Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut diatas.  
Demikian untuk menjadikan perhatian dan guna seperturnya.

Ponorogo, 07 Januari 2021

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PONOROGO  
Kabid Sospol

41

**F. Surat Balasan dari DPPKB Ponorogo ke Fakultas Kesehatan Masyarakat**



**PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
Gedung Terpadu Lt. 5 Jln. Basuki Rahmat Telp. (0352) 481874 Fax. 485006

**PONOROGO**

Ponorogo, 18 Januari 2020

Nomor	: 02.071/ 153 /405.12/2021	Kepada	Yth. Wakil Dekan I Universitas
Sifat	: Penting		Airlangga Surabaya
Lampiran	: 1 (satu) lembar		di
Perihal	: <b>Permohonan Audiensi Online</b>		<b>PONOROGO</b>

Menindaklanjuti surat dari Wakil Dekan I Universitas Airlangga Surabaya Nomor : 5246/UN3.1.10/PK2020 tanggal 4 Nopember 2020 perihal **Permohonan Audiensi Online**.

Pada dasarnya kami **menerima** permohonan dimaksud dan selanjutnya para mahasiswa akan di bimbing oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana :  
**Drs. BAMBANG SUHARYANTO.**

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN PONOROGO**



**Drs. HARJONO, M.Kes**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661108 199203 1 008

G.

**DAFTAR HADIR MAHASISWA MAGANG DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN 2021**

<b>Hari, Tanggal</b>	<b>Nama Mahasiswa</b>	<b>NIM</b>	<b>Kehadiran</b>
Senin, 18 Januari 2021	Ruri Kharisma Fitriani	101711133108	Hadir
	Nuranisah Djunaedi	101711133217	Hadir
	Alifiah Puji Larasati	101711133112	Hadir
Selasa, 19 Januari 2021	Ruri Kharisma Fitriani	101711133108	Hadir
	Nuranisah Djunaedi	101711133217	Hadir
	Alifiah Puji Larasati	101711133112	Hadir
Rabu, 20 Januari 2021	Ruri Kharisma Fitriani	101711133108	Hadir
	Nuranisah Djunaedi	101711133217	Hadir
	Alifiah Puji Larasati	101711133112	Hadir
Kamis, 21 Januari 2021	Ruri Kharisma Fitriani	101711133108	Hadir
	Nuranisah Djunaedi	101711133217	Hadir
	Alifiah Puji Larasati	101711133112	Hadir
Jumat, 22 Januari 2021	Ruri Kharisma Fitriani	101711133108	Hadir
	Nuranisah Djunaedi	101711133217	Hadir
	Alifiah Puji Larasati	101711133112	Hadir

Senin, 25 Januari 2021	Ruri Kharisma Fitriani	101711133108	Hadir
	Nuranisah Djunaedi	101711133217	Hadir
	Alifiah Puji Larasati	101711133112	Hadir
Selasa, 26 Januari 2021	Ruri Kharisma Fitriani	101711133108	Izin (Seminar Proposal Skripsi)
	Nuranisah Djunaedi	101711133217	Izin (Seminar Proposal Skripsi)
	Alifiah Puji Larasati	101711133112	Izin (Seminar Proposal Skripsi)
Rabu, 27 Januari 2021	Ruri Kharisma Fitriani	101711133108	Hadir
	Nuranisah Djunaedi	101711133217	Hadir
	Alifiah Puji Larasati	101711133112	Hadir
Kamis, 28 Januari 2021	Ruri Kharisma Fitriani	101711133108	Hadir
	Nuranisah Djunaedi	101711133217	Hadir
	Alifiah Puji Larasati	101711133112	Hadir
Jumat, 29 Januari 2021	Ruri Kharisma Fitriani	101711133108	Hadir
	Nuranisah Djunaedi	101711133217	Hadir
	Alifiah Puji Larasati	101711133112	Hadir
Senin, 1 Februari 2021	Ruri Kharisma Fitriani	101711133108	Hadir
	Nuranisah Djunaedi	101711133217	Hadir
	Alifiah Puji Larasati	101711133112	Hadir

Selasa, 2 Februari 2021	Ruri Kharisma Fitriani	101711133108	Hadir
	Nuranisah Djunaedi	101711133217	Hadir
	Alifiah Puji Larasati	101711133112	Hadir
Rabu, 3 Februari 2021	Ruri Kharisma Fitriani	101711133108	Hadir
	Nuranisah Djunaedi	101711133217	Hadir
	Alifiah Puji Larasati	101711133112	Hadir
Kamis, 4 Februari 2021	Ruri Kharisma Fitriani	101711133108	Hadir
	Nuranisah Djunaedi	101711133217	Hadir
	Alifiah Puji Larasati	101711133112	Hadir
Jumat, 5 Februari 2021	Ruri Kharisma Fitriani	101711133108	Hadir
	Nuranisah Djunaedi	101711133217	Hadir
	Alifiah Puji Larasati	101711133112	Hadir
Senin, 8 Februari 2021	Ruri Kharisma Fitriani	101711133108	Hadir
	Nuranisah Djunaedi	101711133217	Hadir
	Alifiah Puji Larasati	101711133112	Hadir
Selasa, 9 Februari 2021	Ruri Kharisma Fitriani	101711133108	Hadir
	Nuranisah Djunaedi	101711133217	Hadir
	Alifiah Puji Larasati	101711133112	Hadir

Rabu, 10 Februari 2021	Ruri Kharisma Fitriani	101711133108	Hadir
	Nuranisah Djunaedi	101711133217	Hadir
	Alifiah Puji Larasati	101711133112	Hadir
Kamis, 11 Februari 2021	Ruri Kharisma Fitriani	101711133108	Hadir
	Nuranisah Djunaedi	101711133217	Hadir
	Alifiah Puji Larasati	101711133112	Hadir
Jumat, 12 Februari 2021	Ruri Kharisma Fitriani	101711133108	Libur Tahun Baru Imlek
	Nuranisah Djunaedi	101711133217	Libur Tahun Baru Imlek
	Alifiah Puji Larasati	101711133112	Libur Tahun Baru Imlek
Senin, 15 Februari 2021	Ruri Kharisma Fitriani	101711133108	Hadir
	Nuranisah Djunaedi	101711133217	Hadir
	Alifiah Puji Larasati	101711133112	Hadir
Selasa, 16 Februari 2021	Ruri Kharisma Fitriani	101711133108	Hadir
	Nuranisah Djunaedi	101711133217	Hadir
	Alifiah Puji Larasati	101711133112	Hadir
Rabu, 17 Februari 2021	Ruri Kharisma Fitriani	101711133108	Hadir
	Nuranisah Djunaedi	101711133217	Hadir
	Alifiah Puji Larasati	101711133112	Hadir

Kamis, 18 Februari 2021	Ruri Kharisma Fitriani	101711133108	Hadir
	Nuranisah Djunaedi	101711133217	Hadir
	Alifiah Puji Larasati	101711133112	Hadir
Jumat, 19 Februari 2021	Ruri Kharisma Fitriani	101711133108	Hadir
	Nuranisah Djunaedi	101711133217	Hadir
	Alifiah Puji Larasati	101711133112	Hadir
Senin, 22 Februari 2021	Ruri Kharisma Fitriani	101711133108	Hadir
	Nuranisah Djunaedi	101711133217	Hadir
	Alifiah Puji Larasati	101711133112	Hadir
Selasa, 23 Februari 2021	Ruri Kharisma Fitriani	101711133108	Hadir
	Nuranisah Djunaedi	101711133217	Hadir
	Alifiah Puji Larasati	101711133112	Hadir
Rabu, 24 Februari 2021	Ruri Kharisma Fitriani	101711133108	Hadir
	Nuranisah Djunaedi	101711133217	Hadir
	Alifiah Puji Larasati	101711133112	Hadir
Kamis, 25 Februari 2021	Ruri Kharisma Fitriani	101711133108	Hadir
	Nuranisah Djunaedi	101711133217	Hadir
	Alifiah Puji Larasati	101711133112	Hadir

Jumat,	Ruri Kharisma Fitriani	101711133108	Hadir
26 Februari 2021	Nuranisah Djunaedi	101711133217	Hadir
	Alifiah Puji Larasati	101711133112	Hadir

Ponorogo, 4 Maret 2021  
Pembimbing di Dinas Pengendalian Penduduk dan



Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo,  
**Drs. Bambang Suharyanto**  
NIP. 19640311 199203 1 009

H.

**FORMAT RENCANA KERJA MAHASISWA MAGANG**

Minggu	Rencana Kerja	Menyetujui	
		Pembimbing Instansi	Pembimbing Departemen
I	Pengenalan PPKB Kabupaten Ponorogo secara umum		
II	Mempelajari Bidang Keluarga Berencana		
III	Mempelajari Bidang Keluarga Berencana		
IV	Mempelajari Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera		
V	Mempelajari Bidang Ketahanan dan Keluarga Sejahtera		
VI	Mempelajari Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan		

## I.

**LOGBOOK LAPORAN HARIAN MAHASISWA MAGANG**

Nama Mahasiswa : Alifiah Puji Larasati

NIM : 101711133112

Tempat Magang : DPPKB Kabupaten Ponorogo (*Online*)

<b>Tanggal</b>	<b>Kegiatan</b>
Hari ke-1 18 Januari 2021	Perkenalan diri, koordinasi dan diskusi mengenai pelaksanaan magang melalui WA Grup
Hari ke-2 19 Januari 2021	Diskusi bersama tim magang mengenai rencana penugasan dan kebutuhan data data yang akan digunakan untuk menyusun laporan magang melalui telepon WA Grup
Hari ke-3 20 Januari 2021	Mengambil surat balasan magang di DPPKB Kabupaten Ponorogo dan bertemu dengan dosen pembimbing magang ya baru (Bapak Bambang Suharyanto), kemudian perkenalan secara singkat dan meminta nomor telepon untuk dimasukkan ke dalam Grup WA. Dilanjutkan perkenalan secara online bersama tim magang
Hari ke-4 21 Januari 2021	Diskusi bersama dengan dosen pembimbing instansi terkait bentuk penugasan serta konfirmasi mengenai data yang dibutuhkan
Hari ke-5 22 Januari 2021	Diskusi dengan dosen pembimbing instansi mengenai gambaran umum DPPKB Kabupaten Ponorogo
Hari ke-1 25 Januari 2021	Mendapatkan SOTK Perbup No.66 Tahun 2016 (perbub lama) dan berdiskusi mengenai isinya dengan tim magang, dan list pertanyaan yang ingin ditanyakan
Hari ke-2 26 Januari 2021	Tidak ada penugasan maupun diskusi karena mahasiswa Seminar Proposal Skripsi

Hari ke-3 27 Januari 2021	Diskusi dan menanyakan beberapa hal berkaitan dengan SOTK Perbup No.66 Tahun 2016 (perbup lama) bersama dosen pembimbing instansi
Hari ke-4 28 Januari 2021	Mendapatkan file Perbup No. 2 tahun 2017 untuk acuan SOTK DPPKB yang baru, kemudian mendiskusikan hubungannya dengan SOTK Perbup No.66 Tahun 2016 yang telah didapatkan Senin lalu.
Hari ke-5 29 Januari 2021	Diskusi dan menanyakan beberapa hal berkaitan dengan SOTK Perbup No.2 Tahun 2017 (perbup baru) bersama dosen pembimbing instansi dan mendapatkan susunan organisasi DPPKB Kabupaten Ponorogo
Hari ke-1 1 Februari 2021	Mendapatkan <i>pamflet</i> yang berjudul “Mari Mengenal KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran”, mendiskusikan dengan tim magang dan menanyakan hal yang ingin ditanyakan melalui WA Grup
Hari ke-2 2 Februari 2021	Mendapatkan <i>pamflet</i> yang berjudul “KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran”, mendiskusikan dengan tim magang dan menanyakan hal yang ingin ditanyakan melalui WA Grup
Hari ke-3 3 Februari 2021	Mendapatkan <i>pamflet</i> yang berjudul “Pendidikan Kesehatan Reproduksi Anak Usia Balita”, mendiskusikan dengan tim magang dan menanyakan hal yang ingin ditanyakan melalui WA Grup
Hari ke-4 4 Februari 2021	Mendapatkan <i>pamflet</i> yang berjudul “Pendidikan Kesehatan Reproduksi Anak Usia Balita”, mendiskusikan dengan tim magang dan menanyakan hal yang ingin ditanyakan melalui WA Grup
Hari ke-5 5 Februari 2021	Mendapatkan <i>minibook</i> yang berjudul “Remaja & Kesehatan Reproduksi”, mendiskusikan dengan tim magang dan menanyakan hal yang ingin ditanyakan melalui WA Grup
Hari ke-1 8 Februari 2021	Mendapatkan <i>pamflet</i> yang berjudul “Penyakit Menular Seksual (PMS)”, mendiskusikan dengan tim magang dan menanyakan hal yang ingin ditanyakan melalui WA Grup
Hari ke-2 9 Februari 2021	Mendapatkan <i>pamflet</i> yang berjudul “Papsmear Upaya Deteksi Dini Resiko Kena Kanker”, mendiskusikan dengan tim magang dan menanyakan hal yang ingin ditanyakan melalui WA Grup

Hari ke-3 10 Februari 2021	Mendapatkan <i>pamflet</i> yang berjudul “Virus HIV/AIDS Penting Dikenali, Dipahami Kemudian Dihindari”, mendiskusikan dengan tim magang dan menanyakan hal yang ingin ditanyakan melalui WA Grup
Hari ke-4 11 Februari 2021	Mendapatkan gambaran informasi mengenai Bidang KB (ruang lingkup, program kerja, sub bidang, nama nama Kasi dan laporan tahun 2020) dengan Pak Bambang (Kabid KB) kemudian mempelajarinya bersama tim magang
Hari ke-5 12 Februari 2021	LIBUR TAHUN BARU IMLEK
Hari ke-1 15 Februari 2021	Berdiskusi dan bertanya kepada Pak Bambang dan Kasi serta staf di Bidang KB mengenai hal hal yang kurang jelas dari softfile yang telah diberikan pada hari sebelumnya dan hal yang sekiranya ingin ditanyakan
Hari ke-2 16 Februari 2021	Mempelajari hasil wawancara terkait program bidang ketahanan keluarga DPPKB Ponorogo
Hari ke-3 17 Februari 2021	Mendapatkan gambaran informasi mengenai Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (ruang lingkup, program kerja, sub bidang, nama nama Kasi dan laporan tahun 2020) dengan Pak Harminto (Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga) kemudian mempelajarinya bersama tim magang
Hari ke-4 18 Februari 2021	Berdiskusi dan bertanya kepada Pak Harminto, Bu Rima dan Pak Edi mengenai hal hal yang kurang jelas dari softfile yang telah diberikan pada hari sebelumnya dan hal yang sekiranya ingin ditanyakan
Hari ke-5 19 Februari 2021	Mendapatkan gambaran informasi mengenai Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan (ruang lingkup, program kerja, sub bidang, nama nama Kasi dan laporan tahun 2020) dengan Pak Edy (Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan) dan Pak Tono, kemudian mempelajarinya bersama tim magang
Hari ke-1 22 Februari 2021	Berdiskusi dan sharing dengan mahasiswa dari UNMUH Ponorogo mengenai program yang ada di Dinas PPKB serta manajemen.

Hari ke-2 23 Februari 2021	Membantu pegawai dinas (Bu Diana) mengedit beberapa template surat untuk LPJ
Hari ke-3 24 Februari 2021	Mendapatkan data laporan tahun 2020 meliputi Jumlah PUS di Kabupaten Ponorogo, Cakupan peserta KB Baru, Peserta KB Aktif, Jumlah perkawinan dan usia kawin pertama serta menganalisis data laporan peserta KB Aktif di Kabupaten Ponorogo tahun 2019 dan 2020
Hari ke-4 25 Februari 2021	Membantu pegawai dinas (Bu Diana) mengedit power point dari BKKBN
Hari ke-5 26 Februari 2021	Meminta tanda tangan daftar hadir dan evaluasi/penilaian magang untuk laporan magang serta berpamitan kepada seluruh pegawai di dinas PPKB

Ponorogo, 4 Maret 2021

Pembimbing Instansi,

**Drs. Bambang Suharyanto**  
NIP. 19640311 199203 1 009

**J. DOKUMENTASI KEGIATAN**

<p>Diskusi bersama melalui <i>whatsapp call</i></p>	
<p>Salah satu bahan untuk dibaca dan didiskusikan</p>	